



DINAS PENDIDIKAN
KAB. LAMONGAN

Lamongan
Megilan

LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RESIKO DINAS PENDIDIKAN KAB. LAMONGAN TAHUN 2024



Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 75
LAMONGAN



disdik@lamongankab.go.id



www.disdik.lamongankab.go.id

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan - Sunkutabel - Kompeten
Harmonis - Loyal - Adaptif - Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, kegiatan penyusunan Pelaksanaan Penilaian Resiko Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan.

Pelaksanaan Penilaian Resiko merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko. Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Intern

Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan memperhatikan struktur dan praktik tata kelola organisasi. Diperlukan komitmen dari semua pihak yang terkait untuk melaksanakan rekomendasi yang muncul dalam Laporan Pelaksanaan Penilaian Resiko Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan ini. Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan Laporan Pelaksanaan Penilaian Resiko ini, kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap agar Laporan Pelaksanaan Penilaian Resiko ini bermanfaat dan memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan organisasi.

Lamongan, April 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan



Ir. MUNIF SYARIF, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19650630 199202 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Ruang Lingkup	3
BAB II PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN .	4
A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini	4
B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian	5
BAB III PENILAIAN RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	8
A. Penetapan Kontekas/Tujuan	8
B. Hasil Identifikasi Resiko	12
C. Hasil Analisis Resiko	18
D. Pengendalian Yang Sudah Dilakukan	26
E. Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan	28
BAB IV PENILAIAN RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	33
BAB V PENILAIAN RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	37
BAB VI PENUTUP	41
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap aktivitas yang dilakukan organisasi tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko tersebut dapat menyebabkan kegagalan atau kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan risiko juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko, maka Organisasi Perangkat Daerah diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu:

1. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. keandalan pelaporan keuangan;
3. pengamanan aset negara; dan
4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan. Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Dinas pendidikan Kabupaten Lamongan menyusun Rencana Tindak Pengendalian, sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2024 ini diprioritaskan untuk mencapai kualitas pencapaian tujuan organisasi, penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan didukung pengendalian intern yang memadai.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
4. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Control Self Assessment untuk Penilaian Risiko;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Control Environment Evaluation (CEE);
8. Peraturan Kepala BPKP RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko;
9. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan
10. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/193/KEP/413.013/2023 tahun 2023 tentang Struktur Pengelolaan Resiko Kabupaten Lamongan.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Pengelolaan Resiko dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

2. Tujuan

Pengelolaan Resiko bertujuan untuk (1) memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, (2) mewujudkan budaya pengendalian intern, (3) mengidentifikasi hambatan yang ada dalam penyelenggaraan SPIP, (4) memberikan rencana pemecahan masalah

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penyelenggaraan SPIP ini meliputi pengelolaan risiko strategis pemerintah daerah, risiko strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan risiko kegiatan (operasional) OPD.

BAB II

PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

a. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu organisasi yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Olehkarena itu, setiap organisasi wajib menciptakan kondisi lingkungan pengendalian yang kondusif agar sistem pengendalian intern dapat terimplementasi secara efektif.

Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang dapat mendorong tercapainya pengendalian intern yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

1. Penegakan integritas dan nilai etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Kepemimpinan yang kondusif;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern Control Environment Evaluation (CEE) kepada 37 (tiga puluh tujuh) responden menunjukkan hasil lingkungan pengendalian menunjukkan hasil yang memadai meskipun masih ada catatan yang harus ditingkatkan dalam pelaksanaannya.

Hasil penilaian lingkungan pengendalian tersebut selanjutnya divalidasi dan disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, diperoleh gambaran sebagai berikut :

Tabel 1.
Hasil Evaluasi Lingkungan Pengendalian
pada Dinas Pendidikan Kab. Lamongan Tahun 2024

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif Memadai	Memadai
4	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan peran APIP yang Efektif Memadai	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan Control Environment Evaluation, menunjukkan kondisi yang memadai tapi masih diperlukan perbaikan agar dapat mencapai suatu kondisi yang di harapkan sebagai tujuan adanya pengelolaan resiko ini . Selanjutnya akan dilakukan pengendalian dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.
Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian
Pada Dinas pendidikan Tahun 2024

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang diperbaiki	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
I	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA			
	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik ditindaklanjuti tapi masih belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku	Penegakan Integritas dan nilai etika sudah terbangun dengan baik dimana pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku dan ini perlu di tingkatkan	Kepala Dinas Pendidikan / Sekretaris	Tahun 2024

2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI			
	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi tetapi belum dilakukan secara berkala.	Komitmen Terhadap Kompetensi di Dinas Pendidikan Kab. Lamongan sudah diterapkan dengan baik, tapi masih perlu ditingkatkan terutama pada aspek Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala dengan membuat perencanaan dan target yang harus dicapai dalam setiap pelatihan	Kepala Dinas Pendidikan / Sekretaris	Tahun 2024
3	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN			
	Tidak Semua pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap tetapi masih ada pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Pada Dinas Pendidikan Kab. Lamongan sudah terbangun dengan baik tetapi masih ada Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai yang bersifat adhoc (sementara) sehingga OPD perlu melakukan analisis dan pengajuan formasi ASN .	Kepala Dinas Pendidikan / Sekretaris	Tahun 2024
4	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT			
	Masih ada kriteria pendelegasian wewenang ditentukan belum secara tepat	Pimpinan mengkomunikasikan wewenang dan tanggung jawab dengan jelas dan dipahami oleh pegawai, kemudian direviu dan dimutakhirkan secara	Kepala Dinas Pendidikan / Sekretaris	Tahun 2024

		berkala		
5	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA			
	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, tetapi belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	Untuk Sub Unsur Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Pimpinan OPD melakukan evaluasi kinerja pegawai, dan harus dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan sehingga antara kinerja sebanding dengan penghasilan	Kepala Dinas Pendidikan / Sekretaris	Tahun 2024

BAB III

PENILAIAN RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

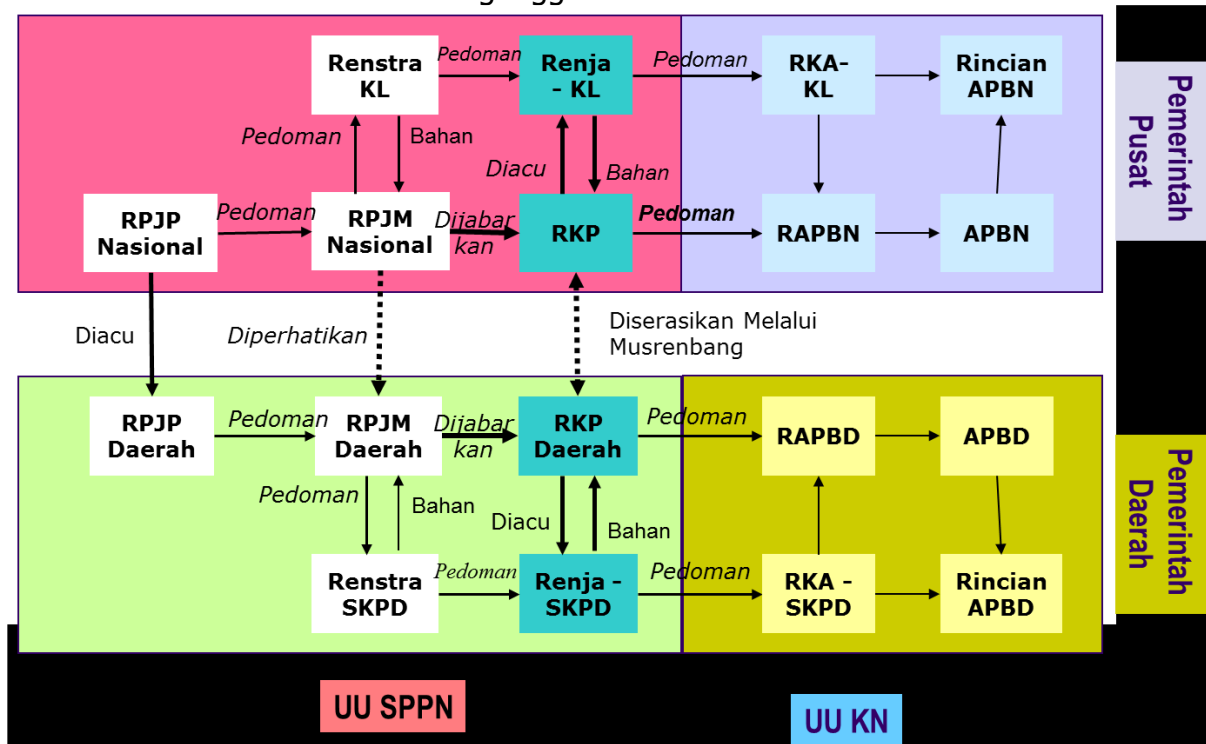
A. Penetapan Konteks/Tujuan

Dokumen perencanaan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD, sebagai contoh, memuat antara lain tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dan OPD dalam satu masa pemerintahan kepala daerah. Sedangkan tujuan pada tingkatan kegiatan, antara lain tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja OPD (Renja). Oleh karena itu, tujuan pemerintah daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis tujuan, yaitu tujuan strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD, tujuan strategis OPD yang tertuang dalam dokumen Renstra OPD, dan tujuan pada tingkat kegiatan/operasional yang tertuang dalam dokumen Renja OPD.

Dalam kerangka perencanaan tersebut harus ada keselarasan antar dokumen sehingga masing-masing tingkatan akan saling mendukung dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Secara rinci keselarasan antar dokumen perencanaan tersebut tertuang dalam gambar berikut

Gambar 1.

Alur Perencanaan dan Penganggaran Serta Keterkaitan Antar Dokumen



Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan telah mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, khususnya terkait dengan sub agenda Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan. Secara singkat substansi Renstra Dinas Pendidikan, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Visi

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Lamongan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan :

Visi:

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”.

Makna dari atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *stakeholders* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. **Terwujudnya**, mengandung arti upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka mencapai kejayaan lamongan dan keadilan bagi masyarakat.
2. **Kejayaan**, adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten yang masyhur, unggul dan maju dalam pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, kebudayaan dan ekonomi yang berbasis potensi unggulan, sehingga terwujud kesejahteraan lahir batin bagi masyarakat.
3. **Berkeadilan**, adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunannya dan konektivitas pelayanan publik serta meningkat aksesibilitasnya. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan dan kehadiran pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat, sehingga dapat menurunkan kondisi ketimpangan dan kemiskinan.

Semangat kejayaan yang berkeadilan dapat direpresentasikan dengan kemandirian dan kesejahteraan serta pemerataan. Secara teknis dapat diintervensi melalui sinergitas antar *stakeholder* pembangunan yakni

masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan, pemerintah sebagai pelaksana pembangunan dan sektor swasta serta akademisi sebagai supporting dalam pembangunan Kabupaten Lamongan lima tahun kedepan.

b. Misi

Sedangkan Untuk *Misi* Dinas Pendidikan juga mengacu pada misi ke 2 Pemerintah Daerah yaitu :

“ Mewujudkan SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman “

b. Tujuan

Untuk merealisasikan visi dan misi ke 2 Pemerintah Kabupaten Lamongan, Dinas Pendidikan bertujuan untuk memberikan arah dalam mewujudkan pembangunan bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten dan mendukung tujuan yaitu:

” Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing”.

c. Sasaran

sasaran dinas pendidikan juga mengacu pada sasaran pemerintah daerah yaitu :

” Meningkatnya Kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan”

Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026

Misi 2				RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026
Mewujudkan SDM Unggul Berdaya Saing dan Berakhlak yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman				
Tujuan 1				
Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan				
Sasaran 1				
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Dasar Pendidikan				
Tujuan, dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan Lamongan				
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Penanggungjawab	
Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan	1. Terjaminya kualitas dan aksesibilitas Pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan	1. Angka rata-rata lama sekolah (MYS)	Kepala Dinas Pendidikan	
		2. Angka harapan lama sekolah (EYS)	Kepala Dinas Pendidikan	
	2. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	% Guru Bersertifikat Pendidik	Kepala Dinas Pendidikan	
	3. Meningkatnya Manajemen Internal Dinas Pendidikan	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	Penilaian dari inspektorat	

B. Hasil Identifikasi Risiko

Pengelolaan risiko strategis pemerintah daerah bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintahan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat pemerintah daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala OPD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Kepala Bappelitbangda, atau OPD yang menangani perencanaan selaku koordinator teknis.

Pengelolaan risiko strategis OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis OPD yang tertuan dalam dokumen Perencanaan Strategis OPD (Renstra OPD). Sedangkan pengelolaan risiko operasional OPD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama OPD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan OPD, seperti; Penetapan Kinerja OPD (Perkin), dan Rencana Kerja OPD (Renjadan/atau RKPD).

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat OPD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan OPD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 dan dibantu oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3, Eselon 4 dan Sub Koordinator.

Hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko) diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3.
Hasil Identifikasi Risiko

No	Uraian Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab Risiko	Sumber Risiko	C/UC	Dampak	Penerima Dampak
I	Risiko Strategis Perangkat Daerah Dinas Pendidikan						
1	Masih rendahnya angka partisipasi warga usia 15 tahun keatas yang belum menyelesaikan pendidikan formal untuk mengikuti pendidikan kesetaraan	Kepala Dinas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 2. Banyak yang sudah berkeluarga 	Eksterna I	C	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya angka rata-rata lama sekolah 2. Berpotensi bertambahnya angka kemiskinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan 2. Pemda 3. Masyarakat
2	Masih adanya angka putus sekolah pada setiap jenjang	Kepala Dinas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Pendidikan yang tidak terjangkau oleh keluarga miskin 2. Masih adanya Bullying atau tindak kekerasan di sekolah 3. kurangnya kesadaran siswa dan orang tua akan pendidikan 	Eksterna I	C	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Harapan Lama Sekolah Menurun sehingga tidak mencapai target yang telah di tetapkan 2. Banyak Pekerja Anak Di bawah umur 3. Berdampak pada naiknya angka kemiskinan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan 2. Pemda 3. Masyarakat
3	Masih terdapat guru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat Pendidik	Kepala Dinas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru belum memenuhi kualifikasi S1/D4 linier 2. Belum terdaftar pada Dapodik 	Internal	C	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesejahteraan guru belum meningkat 2. Kualitas guru masih rendah 3. Kualitas pendidikan tidak merata dan mengalami penurunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan 2. Pemda 3. Guru

4	Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan yang tidak mencapai target	Kepala Dinas pendidikan	1. SDM yang tidak berkompeten 2. Integritas dan etika yang rendah	Internal	C	1. Tidak bisa tercapai peLayanan secara maksimal 2. Akuntabilitas Kinerja tidak bisa tercapai dengan baik	1. Dinas Pendidikan 2. Pemda 3. Masyarakat
II Risiko Operasional Perangkat Daerah Dinas Pendidikan							
1	Adanya keterlambatan pendataan pada satuan pendidikan yang masih akreditasi C dan Satuan Pendidikan yang belum Akreditasi	Kepala Dinas, Kabid dan Satuan Pendidikan	1. Satuan Pendidikan belum mengirimkan data akreditasi 2. adanya Satuan Pendidikan yang baru berdiri	Internal	C	1. Terlambat dalam Pengumpulan data Sekolah yang belum akreditasi 2. Tidak masuk dalam prioritas penilaian oleh BAN 3. Satuan Pendidikan telat untuk penilaian akreditasi	1. Dinas Pendidikan 2. Pemda 3. Masyarakat
2	Adanya Satuan Pendidikan yang belum memenuhi syarat untuk penilaian akreditasi sekolah	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD, SMP dan PNF	1. Sarana dan Prasarana satuan pendidikan yang belum memadai 2. Kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan yang belum standar 3. Pembelajaran yang belum sesuai dengan kurikulum yang berlaku	Internal	C	1. Satuan Pendidikan tidak lolos penilaian akreditasi 2. Nilai Akreditasi yang belum naik minimal B	Disdik, Pemda dan satuan Pendidikan
3	Pendataan satuan Pendidikan yang berhak untuk menerima bantuan terlambat diterim	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD,SMP	Satuan pendidikan belum melakukan pemutakhiran data sarpras di aplikasi DAPODIK	Internal	C	1. Data terlambat diterima oleh Dinas Pendidikan 2. salah sasaran pemberian bantuan	Disdik, Pemda dan satuan Pendidikan

		dan PNF					
4	Masih terdapat Peserta didik dari keluarga miskin yang tidak menerima beasiswa	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD, SMP dan PNF	Tidak Terdata dalam pengajuan beasiswa	Internal	C	1. Meningkatnya angka putus sekolah 2. Pengetasan kemiskinan terhambat	Dinas Pendidikan, Pemda dan Masyarakat
5	Pengajuan Formasi ASN tidak sesuai dengan Analisis Kebutuhan	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid GTK	1. Adanya kesalahan dalam penghitungan analisis kebutuhan 2. Satuan pendidikan terlambat mengirimkan data analisis kebutuhan ke dinas pendidikan	Internal	C	1. Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan tidak merata 2. adanya Kesenjangan kualitas pendidikan	Instansi, Pemda dan Masyarakat
6	Masih terdapat guru yang tidak bisa naik pangkat dan jabatan pada periode tersebut	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid GTK	Banyak guru yang tidak memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat dan jabatan	Internal	C	Guru tidak bisa naik pangkat dan jabatan pada periode tersebut	Guru/Tenaga Pendidik
7	Terdapat satuan Pendidikan yang tidak menerima SK. Penerima BOS/BOP	Kepala Dinas pendidikan, Sekretaris Dinas	Satuan Pendidikan tidak melakukan penginputan data sekolah yang benar pada Aplikasi DAPODIK	Internal	C	1. Sataun pendidikan tidak menerima dana BOS dan BOP 2. Terhambatnya Proses Pembelajaran karena terbenturnya anggaran	Satuan Pendidikan
8	Adanya satuan pendidikan yang belum memahami JUKNIS BOS/BOP secara benar	Kepala Dinas pendidikan dan Sekretaris Dinas	Keterbatasan tenaga SDM Bendahara terutama untuk PAUD dan SD	Internal	C	Banyak Laporan Yang tidak sesuai dengan JUKNIS	Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan

9	Satuan Pendidikan terlambat dalam penyampaian laporan BOS/BOP sesuai waktu yang sudah ditetapkan	Kepala Dinas pendidikan dan Sekretaris Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak Bendahara BOS/BOP yang belum mengerti aplikasi ARKAS 2. Sering Bergantinya dan Update Aplikasi ARKAS sehingga menyulitkan bendahara untuk memahaminya 	Internal	C	Terlambat dalam menyampaikan laporan akan berdampak pada pemotongan dana BOS/BOP	Dinas Pendidikan dan satuan Pendidikan
10	Banyak Peserta Pelatihan Aplikasi yang kurang memahami apa yang disampaikan oleh narasumber	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid GTK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur yang kurang kompeten 2. Peserta Pelatihan tidak menguasai IT 	Internal	C	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Peserta pelatihan yang tidak meningkat 2. Harapan adanya pelatihan tidak tercapai secara maksimal 	Dinas Pendidikan, dan Satuan Pendidika
11	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik tidak dapat terbentuk	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya fasilitas dari Dinas Pendidikan 2. Kurang adanya Koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Ketua Forum/Komunitas 	Internal	C	Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan kurang berkembang	Dinas Pendidikan, satuan pendidikan dan Tenaga pendidik dan kependidikan
12	Masih adanya tindakan perundungan, dan kekerasan/Bullying pada satuan pendidikan	Kepala Dinas pendidikan dan KABID SD,SMP dan PNF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya persepsi yang berbeda tentang bullying oleh civitas sekolah 2. Tata Kelolah sekolah yang masih perlu perbaikan terutama yang berhubungan 	Internal	C	Terjadinya tindak Perundungan dan kekerasan pada satuan pendidikan	Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan dan Peserta Didik

			dengan tindak perundungan dan kekerasan				
13	Tidak Tersampainya Informasi ke Satuan Pendidikan untuk pendataan peserta didik yang berhak menerima	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD,SMP PNF	Satuan Pendidik tidak Menrima Suarat Undangan Sosialisasi	Internal	C	Adanya peserta didik dari satuan pendidikan yang tidak menerima perlengkapan siswa	Dinas Pendidikan dan pserta Didik yang berhak menerima
14	Perlengkapan Peserta didik yang diterima tidak sesuai dengan standar yang ditentukan	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD,SMP, PNF	Pengadaan barang tidak dilakukan secara transparan	Internal	C	Kualitas barang yang diterima oleg peerta didik berkualitas rendah	Dinas Pendidikan dan Pesrta Didik
15	Penyelesaian Pembangunan melebihi waktu yang ditentukan/tidak sesuai dengan juknis	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD,SMP,P NF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendala cuaca yang tidak menentu 2. Pencairan dana yang terlambat 	Eksternal	C	Pembangunan tidak selesai tepat waktu	Disdik, Kontraktor dan satuan pendidikan

C. Hasil Analisis Risiko

Penetapan struktur analisis risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah (Stakeholders) mengenai aspek-aspek pengelolaan risiko, yang antara lain meliputi:

1. Sumber risiko, berasal dari internal dan eksternal.
2. Dampak risiko, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh atau akibat yang ditimbulkan seandainya peristiwa/kejadian yang menghambat pencapaian tujuan terjadi.
3. Pihak yang terkena dampak, diidentifikasi untuk mengetahui pengaruh dampak tersebut kepada pihak-pihak yang terkait dengan pencapaian tujuan.

Kemudian dilakukan penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah (Stakeholders) mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (acceptable risk) atau tingkat risiko yang dapat ditoleransi (tolerable risk) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (unacceptable risk) dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

Rumusan kriteria tersebut, ditetapkan oleh pihak manajemen sesuai dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan. Setelah itu, dilakukan penilaian risiko terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko, kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko dan skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (acceptable risk) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (unacceptable risk).

Dalam penyusunan RTP ini tim menggunakan skala dampak dalam skala 5, contoh kategori dampak risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel4.
Kategori Dampak Risiko Skala 5

Katagori Dampak	Skor	Operasional Dampak resiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputase	Hukum
Sangat tinggi	5	Kerugian sangat besar	Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	Negatif,tersebar luas dibanyak media masa	Pelanggaran serius, terkena sanksi
Tinggi	4	Kerugian besar	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	Negatif, tersebar di beberapa media nasional/local	Pelanggaran serius, sanksi tertulis
Moderat	3	Kerugian cukup besar	Kegiatan terhambat, kurang efisiensi	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	Pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Kecil	2	Kerugian kecil, kurang material	Kegiatan terhambat, kurang efisiensi	Negatis, terdapat pemberitaan	Pelanggaran biasa, sanksi teguran
Tidak signifikan	1	Kerugian tidak material	Hambatan kegiatan tertangani, tujuan tercapai	Ada pemberitaan negative, namun tidak material	Tidak Material

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. Untuk skala probabilitas, tim penyusun menggunakan kriteria penilaian skala 5, dengan ilustrasi sebagai berikut :

Tabel5.
Tabel Tingkat Kemungkinan/Probabilitas

Level Kemungkinan	Skor	Kriteria Kemungkinan		
		Persentase dalam 1 tahun	Jumlah frekuensi dalam 1 tahun	Kejadian Toleransi Rendah
Hampir tidak terjadi	1	$0% < x \leq 5%$	sangat jarang: < 2 kali	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir
Jarang terjadi	2	$5% < x \leq 10%$	jarang: 2 kali s.d. 5 kali	1 kejadian dalam 4 tahun terakhir
Kadang terjadi	3	$10% < x \leq 20%$	cukup sering: 6 s.d. 9 kali	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir
Sering terjadi	4	$20% < x \leq 50%$	sering: 10 kali s.d. 12 kali	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
Hampir pasti terjadi	5	$50% < x < 100%$	sangat sering: > 12 kali	1 kejadian dalam 1 tahun terakhir

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor probabilitas risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima (acceptable risk) maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima (unacceptable risk). Dalam menentukan skala risiko penulis menggunakan nilai skala 5 dengan ilustrasi sebagai berikut :

Tabel 6.
Kriteria Penerimaan Risiko

Skala Nilai Risiko	Kategori	Penerimaan Risiko	Tindakan
1,00 – 2,00	Sangat Rendah	Dapat diterima	Tidak diperlukan tindakan
2,01-4,00	Rendah	Dapat diterima	Tidak diperlukan tindakan
4,01 – 9,00	Sedang	Diperlukan pengendalian yang lebih baik	disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya
9,01 – 12,00	Tinggi	Harus menjadi Perhatian manajemen	diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
12,01 – 25,00	Sangat Tinggi	Tidak dapat diterima	diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko

Penentuan risiko prioritas dan acceptable/unacceptable risk, digunakan matriks risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko serta kriteria level risiko/risk appetite yang telah ditentukan. Matriks risiko dapat dibuat skala 5, dengan ilustrasi sebagai berikut :

**Diagram1.
Penilaian Risiko Prioritas**

Matriks Analisis Resiko			Dampak Konsekuensi				
			1	2	3	4	5
			Tdk. Signifikan	Kecil	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti					
	4	Kemungkinan Besar					
	3	Mungkin					
	2	Jarang					
	1	Sangat Jarang					
Keterangan			Sangat Rendah (1)	Rendah (2)	Sedang (3)	Tinggi (4)	Sangat tinggi (5)

Tabel
Daftar Resiko Prioritas

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
Risiko Strategis OPD Dinas Pendidikan							
1	Dinas Pendidikan	Masih rendahnya angka partisipasi warga usia 15 tahun keatas yang belum menyelesaikan pendidikan formal untuk mengikuti pendidikan kesetaraan	RSO.24.01.25.01	10	Kepala Dinas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 2. Banyak yang sudah berkeluarga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya angka rata-rata lama sekolah 2. Berpotensi bertambahnya angka kemiskinan
2	Dinas Pendidikan	Masih adanya angka putus sekolah pada setiap jenjang	RSO.24.01.25.2	9	Kepala Dinas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Pendidikan yang tidak terjangkau oleh keluarga miskin 2. Masih adanya Bullying atau tindak kekerasan di sekolah 3. kurangnya kesadaran siswa dan orang tua akan pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Harapan Lama Sekolah Menurun sehingga tidak mencapai target yang telah di tetapkan 2. Banyak Pekerja Anak Di bawah umur 3. Berdampak pada naiknya angka kemiskinan
3	Dinas Pendidikan	Masih terdapat guru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat Pendidik	RSO.24.01.25.3	11	Kepala Dinas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru belum memenuhi kualifikasi S1/D4 linier 2. Belum terdaftar pada Dapodik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesejahteraan guru belum meningkat 2. Kualitas guru masih rendah 3. Kualitas pendidikan tidak merata dan mengalami penurunan
4	Dinas Pendidikan	Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan yang tidak mencapai target	RSO.24.01.25.4	5	Kepala Dinas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang tidak berkompeten 2. Integritas dan etika yang rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak bisa tercapai peLayanan secara maksimal 2. Akuntabilitas Kinerja tidak bisa tercapai dengan baik

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
Risiko Operasional OPD							
1	Dinas Pendidikan	Adanya keterlambatan pendataan pada satuan pendidikan yang masih akreditasi C dan Satuan Pendidikan yang belum Akreditasi	ROO.24.01.25.1	9	Kepala Dinas, Kabid Bidang dan Satuan Pendidikan	1. Satuan Pendidikan belum mengirimkan data akreditasi 2. adanya Satuan Pendidikan yang baru berdiri	1. Terlambat dalam Pengumpulan data Sekolah yang belum akreditasi 2. Tidak masuk dalam prioritas penilaian oleh BAN 3. Satuan Pendidikan telat untuk penilaian akreditasi
2	Dinas Pendidikan	Adanya Satuan Pendidikan yang belum memenuhi syarat untuk penilaian akreditasi sekolah	ROO.24.01.25.2	8	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD, SMP dan PNF	1. Sarana dan Prasarana satuan pendidikan yang belum memadai 2. Kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan yang belum standar 3. Pembelajaran yang belum sesuai dengan kurikulum yang berlaku	1. Satuan Pendidikan tidak lolos penilaian akreditasi 2. Nilai Akreditasi yang belum naik minimal B
3	Dinas Pendidikan	Pendataan satuan Pendidikan yang berhak untuk menerima bantuan terlambat diterima	ROO.24.01.25.3	6	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD, SMP dan PNF	Satuan pendidikan belum melakukan pemutakhiran data sarpras di aplikasi DAPODIK	1. Data terlambat diterima oleh Dinas Pendidikan 2. salah sasaran pemberian bantuan
4	Dinas Pendidikan	Masih terdapat Peserta didik dari keluarga miskin yang tidak menerima beasiswa	ROO.24.01.25.4	11	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD, SMP dan PNF	Tidak Terdata dalam pengajuan beasiswa	1. Meningkatnya angka putus sekolah 2. Pengetasan kemiskinan terhambat
5	Dinas Pendidikan	Pengajuan Formasi ASN tidak sesuai dengan Analisis Kebutuhan	ROO.24.01.25.5	9	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid GTK	1. Adanya kesalahan dalam penghitungan analisis kebutuhan 2. Satuan pendidikan terlambat mengirimkan data analisis kebutuhan ke	1. Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan tidak merata 2. adanya Kesenjangan kualitas pendidikan

					dinas pendidikan		
6	Dinas Pendidikan	Masih terdapat guru yang tidak bisa naik pangkat dan jabatan pada periode tersebut	ROO.24.01.25.6	7	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid GTK	Banyak guru yang tidak memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat dan jabatan	Guru tidak bisa naik pangkat dan jabatan pada periode tersebut
7	Dinas Pendidikan	Terdapat satuan Pendidikan yang tidak menerima SK. Penerima BOS/BOP	ROO.24.01.25.7	8	Kepala Dinas pendidikan, Sekretaris Dinas	Satuan Pendidikan tidak melakukan penginputan data sekolah yang benar pada Aplikasi DAPODIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sataun pendidikan tidak menrima dana BOS dan BOP 2. Terhambatnya Proses Pembelajaran karena terbenturnya anggaran
8	Dinas Pendidikan	Adanya satuan pendidikan yang belum memahami JUKNIS BOS/BOP secara benar	ROO.24.01.25.8	9	Kepala Dinas pendidikan dan Sekretaris Dinas	Keterbatasan tenaga SDM Bendahara terutama untuk PAUD dan SD	Banyak Laoran Yang tidak sesuai dengan JUKNIS
9	Dinas Pendidikan	Satuan Pendidikan terlambat dalam penyampaian laporan BOS/BOP sesuai waktu yang sudah di tetapkan	ROO.24.01.25.9	12	Kepala Dinas pendidikan dan Sekretaris Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak Bendahara BOS/BOP yang belum mengerti aplikasi ARKAS 2. Sering Bergantinya dan Update Aplikasi ARKAS sehingga menyulitkan bendahara untuk memahaminya 	Terlambat dalam menyampaikan laporan akan berdampak pada pemotongan dana BOS/BOP
10	Dinas Pendidikan	Banyak Peserta Pelatihan Aplikasi yang kurang memahami apa yang disampaikan oleh narasumber	ROO.24.01.25.10	8	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid GTK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur yang kurang kompeten 2. Peserta Pelatihan tidak menguasai IT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Peserta pelatihan yang tidak meningkat 2. Harapan adanya pelatihan tidak tercapai secara maksimal
11	Dinas Pendidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik tidak dapat terbentuk	ROO.24.01.25.11	6	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya fasilitas dari Dinas Pendidikan 2. Kurang adanya Koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Ketua 	Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan kurang berkembang

						Forum/Komunitas	
12	Dinas Pendidikan	Masih adanya tindakan perundungan, dan kekerasan/Bullying pada satuan pendidikan	ROO.24.01.25.12	10	Kepala Dinas pendidikan dan KABID SD,SMP dan PNF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya persepsi yang berbeda tentang bullying oleh civitas sekolah 2. Tata Kelolah sekolah yang masih perlu perbaikan terutama yang berhubungan dengan tindak perundungan dan kekerasan 	Terjadinya tindak Perundungan dan kekerasan pada satuan pendidikan
13	Dinas Pendidikan	Tidak Tersampainya Informasi ke Satuan Pendidikan untuk pendataan peserta didik yang berhak menerima	ROO.24.01.25.13	9	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD,SMP PNF	Satuan Pendidik tidak Menrima Suarat Undangan Sosialisasi	Adanya peserta didik dari satuan pendidikan yang tidak menerima perlengkapan siswa
14	Dinas Pendidikan	Perlengkapan Peserta didik yang diterima tidak sesuai dengan standar yang ditentukan	ROO.24.01.25.14	6	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD,SMP, PNF	Pengadaan barang tidak dilakukan secara transparan	Kualitas barang yang diterima oleh peserta didik berkualitas rendah
15	Dinas Pendidikan	Penyelesaian Pembangunan melebihi waktu yang ditentukan/tidak sesuai dengan juknis	ROO.24.01.25.15	9	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD,SMP,PNF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendala cuaca yang tidak menentu 2. Pencairan dana yang terlambat 	Pembangunan tidak selesai tepat waktu

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko:

Tabel 7.

Pengendalian yang sudah dilakukan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian
Risiko Strategis OPD Dinas Pendidikan:				
1	Masih rendahnya angka partisipasi warga usia 15 tahun keatas yang belum menyelesaikan pendidikan formal untuk mengikuti pendidikan kesetaraan	RSO.24.01.25.01	Pendataan masyarakat yang putus sekolah atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal	Banyaknya penduduk Lamongan yang bekerja di luar kabupaten Lamongan
2	Masih adanya angka putus sekolah pada setiap jenjang	RSO.24.01.25.2	1. Memberikan Pemberian Beasiswa PERINTIS Untuk peserta didik dari keluarga Miskin dari jenjang SD sampai Perguruan Tinggiikan program beasiswa bagi guru yang belum berkualifikasi S1/D4 2. Melakukan sosialisasi pada Guru akan pentingnya sertifikat pendidik	Keterbatasan Anggaran sehingga masih ada peserta didik yang memenuhi syarat tapi belum mendapatkan beasiswa
3	Masih terdapat guru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat Pendidik	RSO.24.01.25.3	1. Memberikan program beasiswa bagi guru yang belum berkualifikasi S1/D4 2. Melakukan sosialisasi pada Guru akan pentingnya sertifikat pendidik	1. kurang minatnya guru untuk melanjutkan pendidikan ke S1/D4 2. Masih banyak guru yang belum masuk di aplikasi Dapodik
4	Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan yang tidak mencapai target	RSO.24.01.25.4	1. Perbup No. 29 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan 2. Program Pelatihan dan BIMTEK SAKIP	masih terdapat Kualitas SDM yang belum memenuhi standar

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian
Risiko Operasional OPD Dinas Pendidikan:				
1	Adanya keterlambatan pendataan pada satuan pendidikan yang masih akreditasi C dan Satuan Pendidikan yang belum Akreditasi	ROO.24.01.25.1	1. Input dan Sinkronisasi Data secara berkala pada Aplikasi Dapodik oleh satuan pendidikan 2. Membuat Jadwal jadwal satuan pendidikan yang memenuhi syarat untuk di ajukan penilaian akreditasi.	Satuan pendidikan tidak melakukan updating data pada aplikasi dapodik
2	Adanya Satuan Pendidikan yang belum memenuhi syarat untuk penilaian akreditasi sekolah	ROO.24.01.25.2	Satuan Pendidikan melakukan persiapan semua dokumen sesuai dengan instrumen akreditasi	Banyak dokumen yang di minta pada instrumen akreditasi di mengerti oleh satuan pendidikan
3	Pendataan satuan Pendidikan yang berhak untuk menerima bantuan terlambat diterima	ROO.24.01.25.3	Input data dan sinkronisasi pada aplikasi dapodik secara berkala	Data sarpras pada dapodik banyak yang tidak diupdate sesuai kondisi
4	Masih terdapat Peserta didik dari keluarga miskin yang tidak menerima beasiswa	ROO.24.01.25.4	Melakukan prioritas pada Peserta didik yang belum mendapat bantuan dari yang lainnya	Data diterima sudah melebihi batas waktu yang ditetapkan
5	Pengajuan Formasi ASN tidak sesuai dengan Analisis Kebutuhan	ROO.24.01.25.5	1. ANJAB Dinas Pendidikan 2. Data Analisis Kebutuhan oleh satuan pendidikan	Adanya perbedaan data Dapodik dengan Data Analisis Kebutuhan
6	Masih terdapat guru yang tidak bisa naik pangkat dan jabatan pada periode tersebut	ROO.24.01.25.6	1. Sosialisasi Tentang PAK 2. Input data di Aplikasi PMM	adanya sebagian guru yang belum memanfaatkan Aplikasi PMM
7	Terdapat satuan Pendidikan yang tidak menerima SK. Penerima BOS/BOP	ROO.24.01.25.7	1. Semua Satuan Pendidikan Sudah Terupdate di DAPODIK 2. Semua data di DAPODIK Valid	Masih ada satuan pendidikan yang terlambat sinkronisasi data melebihi Cut Off
8	Adanya satuan pendidikan yang belum memahami JUKNIS BOS/BOP secara benar	ROO.24.01.25.8	1. Semua Satuan Pendidikan Memiliki Juknis BOS/BOP 2. Di berikan layanan BOS/BOP secara daring dan luring	Adanya persepsi yang berbeda-beda oleh satuan pendidikan mengenai apa yang ada pada Juknis BOS/BOP

9	Satuan Pendidikan terlambat dalam penyampaian laporan BOS/BOP sesuai waktu yang sudah di tetapkan	ROO.24.01.25.9	Selalu Mengingatn kepada Satuan Pendidikan	Adanya satuan pendidikan yang aplikasi ARKASnya mengalami kendala
10	Banyak Peserta Pelatihan Aplikasi yang kurang memahami apa yang disampaikan oleh narasumber	ROO.24.01.25.10	1. Pemberian waktu untuk tanya jawab 2. Narasumber yang menguasai materi	Nasih ada peserta pelatihan yang tidak menguasai teknologi informasi
11	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik tidak dapat terbentuk	ROO.24.01.25.11	Adanya Forum pendidik dan Tenaga kependidikan secara mandiri	Belum adanya Koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Koordinator komunitas
12	Masih adanya tindakan perundungan, dan kekerasan/Bullying pada satuan pendidikan	ROO.24.01.25.12	1. Membuat Inovasi BU EWIS 2. Membentuk TPPK	Adanya perbedaan persepsi tentang Bullying/tindak kekerasan pada satuan pendidikan
13	Tidak Tersampainya Informasi ke Satuan Pendidikan untuk pendataan peserta didik yang berhak menerima	ROO.24.01.25.13	Surat Undangan Sosialisasi ke satuan pendidikan	Adanya Satuan pendidikan yang terlambat menerima informasi
14	Perlengkapan Peserta didik yang diterima tidak sesuai dengan standar yang ditentukan	ROO.24.01.25.14	Pengadaan barang sesuai dengan juknis yang berlaku	masih adanya barang yang tidak sesuai dengan standar
15	Penyelesaian Pembangunan melebihi waktu yang ditentukan/tidak sesuai dengan juknis	ROO.24.01.25.15	Melaksanakan pekerjaan lebih awal ketika sudah keluar surat perintah untuk mengerjakan	Tidak segera melaksanakan pekerjaan meskipun sudah ada surat perintah melaksanakan pekerjaan

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risikoterdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

1. Menghindari risiko (avoid)

Menghindari risiko dilakukan dengan cara tidak memulai atau tidak melanjutkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko. Penghindaran risiko dapat menjadi tidak tepat jika individu atau instansi bersifat menolak risiko. Penghindaran risiko secara tidak tepat justru dapat meningkatkan signifikansi risiko lainnya atau mengakibatkan hilangnya peluang memperoleh manfaat.

2. Mengubah/mengurangi kemungkinan munculnya risiko (abate)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah kemungkinan munculnya risiko agar kemungkinan terjadinya hasil yang negatif dapat berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah pencegahan (prevention).

3. Mengubah/mengurangi konsekuensi/dampak risiko (mitigate)

Respon ini dilakukan dengan cara mengubah/ mengurangi konsekuensi/dampak risiko agar kerugian menjadi berkurang. Istilah lain yang juga digunakan adalah penanggulangan. Abate dan mitigate terkadang disebut dalam satu istilah, yaitu mengurangi risiko (reduce).

4. Membagi risiko (share) atau mentransfer risiko

Respon ini melibatkan pihak lain dalam menanggung atau berbagi sebagian risiko. Contoh mekanismenyantara lain meliputi kontrak-kontrak, asuransi, dan struktur organisasi seperti kemitraan dan joint ventures untuk menyebarkan tanggungjawab dan kewajiban. Terkait dengan pembagian risiko dengan instansi lain, umumnya akan terdapat biaya finansial atau manfaat yang timbul, misalnya premi asuransi. Jika risiko dibagi, baik keseluruhan maupun sebagian, maka instansi yang mentransfer risiko mendapat risiko baru, yaitu instansi lain yang memperoleh transfer risiko tersebut tidak dapat mengelola risiko itu secara efektif.

5. Menerima atau mempertahankan risiko (accept/retain)

Setelah risiko diubah atau dibagi, maka akan ada risiko tersisa yang dipertahankan. Pada kasus ekstrem, dapat terjadi suatu instansi tidak memiliki pilihan respon yang lebih baik, selain menerima risiko tersebut. Dari pembahasan dalam tim maka ditetapkan pengendalian yang masih dibutuhkan tergambar sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 8.
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Strategis OPD Dinas Pendidikan:					
1	Masih rendahnya angka partisipasi warga usia 15 tahun keatas yang belum menyelesaikan pendidikan formal untuk mengikuti pendidikan kesetaraan	RSO.24.01.25.01	Melakukan Kerjasama dengan Instansi terkait terutama pemerintahan desa setempat dalam melaksanakan pendataan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid PNF	Semester 1 (Jan s/d Juni 2024)
2	Masih adanya angka putus sekolah pada setiap jenjang	RSO.24.01.25.2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memprioritaskan dari keluarga miskin yang belum mendapat bantuan dari program lain 2. Pengajuan Penambahan Anggaran untuk beasiswa 	Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas Pendidikan	Tribulan 4 (Okt sd Des 2024)
3	Masih terdapat guru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat Pendidik	RSO.24.01.25.3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi pendampingan dan sosialisasi pada guru yang belum bersertifikat pendidik 2. Melakukan input data guru pada aplikasi Dapodi 	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid GTK	Jan sd Des 2024
4	Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan yang tidak mencapai target	RSO.24.01.25.4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan sosialisasi tentang SAKIP 2. Melaksnakan Pelatihan dan BIMTEK SAKIP kepada Semua Pegawai 	Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas	Tribulan II (April sd Jun 2024)

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Operasional OPD Dinas Pendidikan:					
1	Adanya keterlambatan pendataan pada satuan pendidikan yang masih akreditasi C dan Satuan Pendidikan yang belum Akreditasi	ROO.24.01.25.1	Dinas pendidikan melakukan sosialisasi ke satuan pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan dan Bidang SD, SMP dan PNF	Tribulan 1 (Jan sd Mart 2024)
2	Adanya Satuan Pendidikan yang belum memenuhi syarat untuk penilaian akreditasi sekolah	ROO.24.01.25.2	Sosialisasi dan pendampingan terhadap sataun pendidikan yang akan dinilai oleh BAN -SM	Kepala Dinas Pendidikan dan Bidang SD, SMP dan PNF	Tribulan 3 (Juli sd Sep 2024)
3	Pendataan satuan Pendidikan yang berhak untuk menerima bantuan terlambat diterima	ROO.24.01.25.3	Tim Sarpras Dinas Pendidikan melakukan CEK kondisi sarpras langsung ke lokasi	Kepala Dinas Pendidikan dan Bidang SD, SMP dan PNF	Tribulan 1 (Jan sd Maret 2024)
4	Masih terdapat Peserta didik dari keluarga miskin yang tidak menerima beasiswa	ROO.24.01.25.4	1. Melakukan Sosialisasi 2. Pengajuan penmabhan Anggaran Beasiswa	Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas	Tribulan 2 (April sd Jun 2024)
5	Pengajuan Formasi ASN tidak sesuai dengan Analisis Kebutuhan	ROO.24.01.25.5	Melakukan perbaikan data pada Dapodik dan data analisi kebutuhan oleh satuan pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid GTK	Tribulan I (Jan sd Maret 2024)
6	Masih terdapat guru yang tidak bisa naik pangkat dan jabatan pada periode tersebut	ROO.24.01.25.6	Dinas Pendidikan Melakukan Sosialisasi dan BIMTEK cara pengerjaan Ekinerja di PMM	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid GTK	Tribulan I (Jan sd Maret 2024)
7	Terdapat satuan Pendidikan yang tidak menerima SK. Penerima BOS/BOP	ROO.24.01.25.7	Melakukan Sosialisasi dan Pendampingan pada satuan pendidikan untuk Pengerjaan Dapodik	Kepala Dinas Pendidikan dan Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Januari dan Juli 2024
8	Adanya satuan pendidikan yang belum memahami JUKNIS BOS/BOP secara benar	ROO.24.01.25.8	Melakukan BIMTEK dan Sosialisasi ke satuan Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris	April - Mei 2024
9	Satuan Pendidikan terlambat dalam penyampaian	ROO.24.01.25.9	1. Melakukan BIMTEK ARKAS 2. Layanan	Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris	Jan - Des 2024

	laporan BOS/BOP sesuai waktu yang sudah di tetapkan		ARKAS secara daring/Luring		
10	Banyak Peserta Pelatihan Aplikasi yang kurang memahami apa yang disampaikan oleh narasumber	ROO.24.01.25.10	Melalui pelatihan dan BIMTEK semua guru menguasai IT	Kepala Bidang GTK	Juli - Agt 2024
11	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik tidak dapat terbentuk	ROO.24.01.25.11	Dinas Pendidikan Melakukan koordinasi dan memfasilitasi pembentukan komunitas belajar	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid	Juli 2024
12	Masih adanya tindakan perundungan, dan kekerasan/Bullying pada satuan pendidikan	ROO.24.01.25.12	melakukan Sosialisasi dan pendampingan kepada satuan pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid	Jan - Des 2024
13	Tidak Tersampainya Informasi ke Satuan Pendidikan untuk pendataan peserta didik yang berhak menerima	ROO.24.01.25.13	Menyampaikan informasi lewat surat, Website dan Medsos	Kepala Dinas dan Kabid	Mei - Juli 2024
14	Perlengkapan Peserta didik yang diterima tidak sesuai dengan standar yang ditentukan	ROO.24.01.25.14	Melakukan pengadaan barang secara terbuka	Kepala Dinas dan Kabid	Juli - Agts 2024
15	Penyelesaian Pembangunan melebihi waktu yang ditentukan/tidak sesuai dengan juknis	ROO.24.01.25.15	Melaksanakan Pekerjaan Sesuai dengan Juknis yang berlaku	Kepala Dinas dan Kabid	Jun - Des 2024

BAB IV

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Oleh karena itu tim menentukan Rancangan Informasi dan Komunikasi sebagai berikut:

Tabel 9.
Rancangan Informasi dan Komunikasi

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Pendidikan:						
1	Melakukan Kerjasama dengan Instansi terkait terutama pemerintahan dese setempat dalam melaksanakan pendataan	Surat Undangan Nota Dinas Rapat Koordinasi	Dinas Pendidikan	Instansi dan Pemerintahan Desa Terkait	Jan s/d Juni 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu
2	1. Memprioritaskan dari keluarga miskin yang belum mendapat bantuan dari program lain 2. Pengajuan Penambahan Anggaran untuk beasiswa	Surat Undangan Sosial Media Surat Pengajuan Penambahan Anggaran	Dinas Pendidikan(Sekretariat Disdik)	Instansi Terkait, Satuan Pendidikan, Peserta didik dan Mahasiswa	Juli sd Sep 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu
3	1. Memberi pendampingan dan sosialisasi pada guru yang belum bersertifikat pendidik 2. Melakukan input data guru pada aplikasi Dapodik	Surat Undangan Rapat Sosialisasi Lurung/Daring	Dinas Pendidikan (Bidang GTK) dan Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan dan Guru	Jan - Maret 2024	dilaksanakan secara berkala
4	1. Melaksanakan sosialisasi tentang SAKIP 2. Melaksnakan Pelatihan dan BIMTEK SAKIP kepada Semua Pegawai	Surat Undangan Rapat Koordinasi Luring/Daring	Dinas Pendidikan/Sekretriat	Pegawai Dinas Pendidikan	Juli - Sep 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu

Risiko Operasional OPD Dinas Pendidikan:						
1	Dinas pendidikan melakukan sosialisasi ke satuan pendidikan	Surat Undangan Nota Dinas Luring/daring Sosial Media	Dinas Pendidikan/Kabid SD, SMP dan PNF	satuan Pendidikan	Tribulan II (April sd Juni)	dilaksanakan pada waktu tertentu
2	Sosialisasi dan pendampingan terhadap sataun pendidikan yang akan dinilai oleh BAN -SM	Surat Undangan Nota Dinas Luring/daring Sosial Media	Dinas Pendidikan/Kabid SD, SMP dan PNF	satuan Pendidikan	Tribulan III (Juli sd Sep 2024)	dilaksanakan pada waktu tertentu
3	Tim Sarpras Dinas Pendidikan melakukan CEK kondisi sarpras langsung ke lokasi	Surat Pemberitahuan Sosial Media	Dinas Pendidikan/Kabid SD, SMP dan PN	satuan Pendidikan	Tribulan I (Jan sd Maret 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu
4	1. Melakukan Sosialisasi 2. Pengajuan penmabhan Anggaran Beasiswa	Surat Undangan Sosial Media	Dinas Pendidikan/Sekretariat	Peserta didik/mahasiswa/masy arakat	Tribulan III (Juli sd Sep 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu
5	Melakukan perbaiki data pada Dapodik dan data analisi kebutuhan oleh satuan pendidikan	Surat Pemberitahuan Sosial Media Luring/daring	Dinas Pendidikan/Bidang GTK	Guru dan Operator Dapodik	Tribulan I (Jan sd Maret 2024)	dilaksanakan secara berkala
6	Dinas Pendidikan Melakukan Sosialisasi dan BIMTEK cara pengerjaan Ekinerja di PMM	Surat Undangan Sosialisasi dan BIMTEK Sosial Media	Dinas Pendidikan/Bidang GTK	Satuan Pendidikan, Pendidik dan tenaga kependidikan	Tribulan I (Jan sd Maret 2024)	dilaksanakan pada waktu tertentu
7	Melakukan Sosialisasi dan Pendampingan pada satuan pendidikan untuk Pengerjaan Dapodik	Surat Undangan Sosialisasi dan BIMTEK Sosial Media	Dinas Pendidikan/Sub bag Perencanaan	Satuan Pendidikan/OPS	Januari - Agustus 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu
8	Melakukan BIMTEK dan Sosialisasi ke satuan Pendidikan	Surat Undangan Sosialisasi dan BIMTEK Sosial Media	Dinas Pendidikan/Sub bag Perencanaan	Satuan Pendidikan/Bendahara BOS/BOP	Januari - Agustus 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu
9	1. Melakukan BIMTEK	Surat Undangan	Dinas Pendidikan/Sekretaris	Satuan	April - Mei	dilaksanakan

	ARKAS 2. Layanan ARKAS secara daring/Luring	Sosialisasi dan BIMTEK Sosial Media	Dinas	Pendidikan/Bendahara BOS/BOP	2024	pada waktu tertentu
10	Melalui pelatihan dan BIMTEK semua guru menguasai IT	Surat Undangan Sosialisasi dan BIMTEK Sosial Media	Dinas Pendidikan/Bidang GTK	Satuan Pendidikan dan tenaga Pendidik	Juli - Agt 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu
11	Dinas Pendidikan Melakukan koordinasi dan memfasilitasi pembentukan komunitas belajar	Surat Undangan Rapat Koordinasi Sosial Media	Dinas Pendidikan/Bidang GTK	Dinas Pendidikan/Bidang GTK	Agustus - Okt 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu
12	melakukan Sosialisasi dan pendampingan kepada satuan pendidikan	Surat Undangan Sosialisasi dan Sosial Media	Dinas Pendidikan/Kepala Bidang	Satuan Pendidikan dan Peserta didik	Mei - Juli 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu
13	Menyampaikan informasi lewat surat, Website dan Medsos	Surat Undangan Sosial Media	Dinas Pendidikan/Kepala Bidang	Satuan Pendidikan dan Peserta didik	April - Juni 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu
14	Melakukan pengadaan barang secara terbuka	Surat Undangan Website Media Sosial	Dinas Pendidikan/Kepala Bidang	Masyarakat/Publik	April - Agustus 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu
15	Melaksanakan Pekerjaan Sesuai dengan Juknis yang berlaku	Juknis Surat Media Sosial	Dinas Pendidikan/Kepala Bidang	Satuan Pendidikan dan kontraktor	Mei - Des 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu

BAB V

RANCANGAN PEMANTAUAN

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dan Evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan Evaluasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

Tabel 10.
Rancangan Pemantauan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Pendidikan:						
1	Melakukan Kerjasama dengan Instansi terkait terutama pemerintahan dese setempat dalam melaksanakan pendataan	1. Nota Dinas 2. Mou Kesepakatan kerjasama dengan instansi lain 3. Monitoring Kegiatan	Kabid PNF	Tribulan 1 (Jan – Mar) tahun 2024	Feb 2024	Dilakukan secara berkala
2	1. Memprioritaskan dari keluarga miskin yang belum mendapat bantuan dari program lain 2. Pengajuan Penambahan Anggaran untuk beasiswa	1. MONEV 2. Supervisi	Sekretaria Dinas Pendidikan	Juli - Des 2024	Des 2024	Dilakukan secara berkala
3	1. Memberi pendampingan dan sosialisasi pada guru yang belum bersertifikat pendidik 2. Melakukan input data guru pada aplikasi Dapodik	1. Undangan Sosialisasi dan pendampingan 2. Monitoring Aplikasi Dapodik	Bidang GTK	Jan - Juni 2024	Juni 2024	Dilakukan secara berkala
4	1. Melaksanakan sosialisasi tentang SAKIP 2. Melaksnakan Pelatihan dan BIMTEK SAKIP kepada Semua Pegawai	1. Surat Undangan 2. Nota Dinas 3. Kehadiran 4. Monev Kegiatan	Sekretaris Dinas Pendidikan	Juli - Sep 2024	Sep. 2024	Dilakukan secara berkala
Risiko Operasional OPD Dinas Pendidikan:						
1	Dinas pendidikan melakukan sosialisasi ke satuan pendidikan	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat Undangan 4. Kehadiran	Kabid SD,SMP dan PNF	Juli - Sep 2024	Juli 2024	Dilakukan secara berkala
2	Sosialisasi dan pendampingan terhadap satuan pendidikan yang akan dinilai oleh BAN -SM	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat Undangan 4. Kehadiran	Kabid SD,SMP dan PNF	Juni - Agst 2024	Juni 2024	Dilakukan secara berkala
3	Tim Sarpras Dinas Pendidikan	1. Monev 2. Supervisi	Kabid SD,SMP dan PNF	Jan - Mar 2024	Feb 2024	Dilakukan secara

	melakukan CEK kondisi sarpras langsung ke lokasi	3. Surat Undangan 4. Kehadiran				berkala
4	1. Melakukan Sosialisasi 2. Pengajuan penambahan Anggaran Beasiswa	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat Undangan 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kabid SD,SMP dan PNF	Agus - Okt 2024	Agust 2024	Dilakukan secara berkala
5	Melakukan perbaikan data pada Dapodik dan data analisis kebutuhan oleh satuan pendidikan	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat Undangan 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kabid GTK	Jan - Mar 2024	Jan dan Juli 2024	Dilakukan secara berkala
6	Dinas Pendidikan Melakukan Sosialisasi dan BIMTEK cara pengerjaan Ekinerja di PMM	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kabid GTK	Jan- Feb 2024	Jan 2024	Dilakukan secara berkala
7	Melakukan Sosialisasi dan Pendampingan pada satuan pendidikan untuk Pengerjaan Dapodik	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kasubag Perencanaan	Jan dan Juli 2024	Jan dan Juli 2024	Dilakukan secara berkala
8	Melakukan BIMTEK dan Sosialisasi ke satuan Pendidikan	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kasubag Perencanaan	Jan dan Juli 2024	Jan dan Juli 2024	Dilakukan secara berkala
9	1. Melakukan BIMTEK ARKAS 2. Layanan ARKAS secara daring/Luring	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Sekretaris Dinas Pendidikan	Jan dan Juli 2024	Jan dan Juli 2024	Dilakukan secara berkala
10	Melalui pelatihan dan BIMTEK semua guru menguasai IT	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kabid GTK	Mei - Nov 2024	Mei - Nov 2024	Dilakukan secara berkala
11	Dinas Pendidikan Melakukan koordinasi dan memfasilitasi	1. Monev 2. Supervisi	Kabid GTK	Juli - Des 2024	Juli - Des 2024	Dilakukan secara

	pembentukan komunitas belajar	3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring				berkala
12	melakukan Sosialisasi dan pendampingan kepada satuan pendidikan	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kabid SD, SMP, PNF dan GTK	Jan - Des 2024	Jan - Des 2024	Dilakukan secara berkala
13	Menyampaikan informasi lewat surat, Website dan Medsos	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kabid SD, SMP, PNF dan GTK	April - Juli 2024	April - Juli 2024	Dilakukan secara berkala
14	Melakukan pengadaan barang secara terbuka	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Juknis 5. daring/luring	Kabid SD, SMP, PNF dan GTK	Mei - Juli 2024	Mei - Juli 2024	Dilakukan secara berkala
15	Melaksanakan Pekerjaan Sesuai dengan Juknis yang berlaku	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Juknis	Kabid SD, SMP, PNF dan GTK	Mei - Des 2024	Mei 2024	Dilakukan secara berkala

BAB VI

PENUTUP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses yang berkelanjutan, menekankan pada soft control, dan keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh karakteristik sumber daya manusia. Efektivitas pengembangan lingkungan pengendalian sangat bergantung pada keberhasilan penegakan integritas dan etika, serta adanya komitmen dan teladan dari pimpinan tertinggi untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif. Demikian juga efektivitas identifikasi risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, sangat dipengaruhi oleh pertimbangan, judgement, dan komitmen dari seluruh personil dalam organisasi.

Selanjutnya Pelaksanaan Penilaian Resiko disusun sebagai tindak lanjut Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan uraian tentang bagaimana instansi pemerintah diharapkan dapat mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko. Rencana Tindak Pengendalian Intern Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Tahun 20224 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN – LAMPIRAN
PELAKSANAAN PENILAIAN RESIKO
DINAS PENDIDIKAN KAB. LAMONGAN
TAHUN 2024

Kertas Kerja Strategis OPD
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Nama OPD	Dinas Pendidikan
Tahun Penilaian	2024
Periode yang Dinilai	2024
Tujuan Strategis	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitat pelayanan pendidikan
Urusan Pemerintahan	Pendidikan
OPD yang dinilai	Dinas Pendidikan
Tujuan Strategis Pemerintah	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing
Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjaminnya kualitas dan aksesibilitas Pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan 2. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 3. Meningkatnya Manajemen Internal Dinas Pendidikan

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Masih rendahnya angka partisipasi warga usia 15 tahun keatas yang belum menyelesaikan pendidikan formal untuk mengikuti pendidikan kesetaraan	RSO.24.01.25.01	Kepala Dinas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 2. Banyak yang sudah berkeluarga 	Eksternal	C	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya angka rata-rata lama sekolah 2. Berpotensi bertambahnya angka kemiskinan 	Intansi, Pemda dan Masyarakat
2	Angka Harapan Lama Sekolah	Masih adanya angka putus sekolah pada setiap jenjang	RSO.24.01.25.2	Kepala Dinas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Pendidikan yang tidak terjangkau oleh keluarga miskin 	Internal	C	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Harapan Lama Sekolah Menurun sehingga tidak mencapai target yang telah ditetapkan 	Intansi, Pemda dan Masyarakat

					<ul style="list-style-type: none"> 2. Masih adanya Bullying atau tindak kekerasan di sekolah 3. kurangnya kesadaran siswa dan orang tua akan pendidikan 			<ul style="list-style-type: none"> 2. Banyak Pekerja Anak Di bawah umur 3. Berdampak pada naiknya angka kemiskinan 	
3	Prosentase Guru Bersertifikat Profesi Pendidik	Masih terdapat guru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat Pendidik	RSO.24.01.25.3	Kepala Dinas pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Guru belum memenuhi kualifikasi S1/D4 linier 2. Belum terdaftar pada Dapodik 	Internal	C	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kesejahteraan guru belum meningkat 2. Kualitas guru masih rendah 3. Kualitas pendidikan tidak merata dan mengalami penurunan 	Intansi, Pemda, guru, dan Masyarakat
4	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan yang tidak mencapai target	RSO.24.01.25.4	Kepala Dinas pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> 1. SDM yang tidak berkompeten 2. Integritas dan etika yang rendah 	Internal	C	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tidak bisa tercapai peLayanan secara maksimal 2. Akuntabilitas Kinerja tidak bisa tercapai dengan baik 	Intansi, Pemda dan Masyarakat

Tambah Kertas Kerja Operasional Pemda
Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Nama OPD	Dinas Pendidikan
Tahun Penilaian	2024
Periode yang Dinilai	2024
Tujuan Strategis	Meningkatkan kualitas dan aksesibilit pelayanan pendidikan
Sasaran strategis OPD	1. Terjaminya kualitas dan aksesibilitas Pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan 2. Meningkatnya kuallitas pendidik dan tenaga kependidikan 3. Meningkatnya Manajemen Internal Dinas Pendidikan
Urusan Pemerintahan	Pendidikan
OPD yang Dinilai	Dinas Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumb e		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan PAUD,SD, SMP dan Kesetaraan yang terakreditasi B	Perencanaan	Adanya keterlambatan pendataan pada satuan pendidikan yang masih akreditasi C dan Satuan Pendidikan yang belum Akreditasi	ROO.24.01.25.1	Kepala Dinas, Kabid Bidang dan Satuan Pendidikan	1. Satuan Pendidikan belum mengirimkan data akreditasi 2. adanya Satuan Pendidikan yang baru berdiri	Internal	C	1. Terlambat dalam Pengumpulan data Sekolah yang belum akreditasi 2. Tidak masuk dalam prioritas penilaian oleh BAN 3. Satuan Pendidikan telat untuk penilaian akreditasi	Intansi, Pemda dan satuan pendidikan

2	Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP dan Kesetraan yang terakreditasi B	Pelaksanaan	Adanya Satuan Pendidikan yang belum memenuhi syarat untuk penilaian akreditasi sekolah	ROO.24.01.25.2	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD, SMP dan PNF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan Prasarana satuan pendidikan yang belum memadai 2. Kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan yang belum standar 3. Pembelajaran yang belum sesuai dengan kurikulum yang berlaku 	Internal	C	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan Pendidikan tidak lolos penilaian akreditasi 2. Nilai Akreditasi yang belum naik minimal B 	Disdik, Pemda dan satuan Pendidikan
3	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan dan Rehabilitasi sarana prasarana dan utilitis sekolah sesuai standar	Perencanaan/pendataan	Pendataan satuan Pendidikan yang berhak untuk menerima bantuan terlambat diterima	ROO.24.01.25.3	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD, SMP dan PNF	Satuan pendidikan belum melakukan pemutakhiran data sarpras di aplikasi DAPODIK	Internal	C	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data terlambat diterima oleh Dinas Pendidikan 2. salah sasaran pemberian bantuan 	Intansi, Pemda dan satuan pendidikan
4	Program Pengelolaan Pendidikan	Peserta Didik Jenjang SD/Mi, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi yang berhak menerima Biaya	Pelaksanaan	Masih terdapat Peserta didik dari keluarga miskin yang tidak menerima beasiswa	ROO.24.01.25.4	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD, SMP dan PNF	Tidak Terdata dalam pengajuan beasiswa	Internal	C	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya angka putus sekolah 2. Pengetasan kemiskinan terhambat 	Dinas Pendidikan, Pemda dan Masyarakat

		Personil Peserta Didik (Beasiswa Perintis)									
5	Program Pengelolaan Pendidikan	Ketercukupan Pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia pada satuan pendidikan	Perencanaan	Pengajuan Formasi ASN tidak sesuai dengan Analisis Kebutuhan	ROO.24.01.25.5	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid GTK	1. Adanya kesalahan dalam penghitungan analisis kebutuhan 2. Satuan pendidikan terlambat mengirimkan data analisis kebutuhan ke dinas pendidikan	Internal	C	1. Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan tidak merata 2. adanya Kesenjangan kualitas pendidikan	Instansi, Pemda dan Masyarakat
6	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Perencanaan	Masih terdapat guru yang tidak bisa naik pangkat dan jabatan pada periode tersebut	ROO.24.01.25.6	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid GTK	Banyak guru yang tidak memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat dan jabatan	Internal	C	Guru tidak bisa naik pangkat dan jabatan pada periode tersebut	Guru/Tenaga Pendidik
7	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS/BOP yang sesuai dengan	Perencanaan	Terdapat satuan Pendidikan yang tidak menerima	ROO.24.01.25.7	Kepala Dinas pendidikan, Sekretaris	Satuan Pendidikan tidak melakukan penginputan data sekolah yang	Internal	C	1. Satuan pendidikan tidak menerima dana BOS dan BOP	Satuan Pendidikan

		aturan dan JUKNIS yang berlaku		SK. Penerima BOS/BOP		s Dinas	benar pada Aplikasi DAPODIK			2. Terhambatnya Proses Pembelajaran karena terbenturnya anggaran	
8	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS/BOP yang sesuai dengan aturan dan JUKNIS yang berlaku	Pelaksanaan	Adanya satuan pendidikan yang belum memahami JUKNIS BOS/BOP secara benar	ROO.24.01.25.8	Kepala Dinas pendidikan dan Sekretaris Dinas	Keterbatasan tenaga SDM Bendahara terutama untuk PAUD dan SD	Internal	C	Banyak Laoran Yang tidak sesuai dengan JUKNIS	Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan
9	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS/BOP yang sesuai dengan aturan dan JUKNIS yang berlaku	Pelaporan	Satuan Pendidikan terlambat dalam penyampaian laporan BOS/BOP sesuai waktu yang sudah ditetapkan	ROO.24.01.25.9	Kepala Dinas pendidikan dan Sekretaris Dinas	1. Banyak Bendahara BOS/BOP yang belum mengerti aplikasi ARKAS 2. Sering Bergantinya dan Update Aplikasi ARKAS sehingga menyulitkan bendahara untuk memahaminya	Internal	C	Terlambat dalam menyampaikan laporan akan berdampak pada pemotongan dana BOS/BOP	Dinas Pendidikan dan satuan Pendidikan
10	Program Pengelolaan Pendidikan	Terlaksana pelatihan penggunaan aplikasi di	Pelaksanaan	Banyak Peserta Pelatihan Aplikasi	ROO.24.01.25.10	Kepala Dinas pendidikan dan	1. Instruktur yang kurang kompeten 2. Peserta	Internal	C	1. Kompetensi Peserta pelatihan	Dinas Pendidikan, dan Satuan

		bidang pendidikan dengan baik		yang kurang memahami apa yang disampaikan oleh narasumber		Kabid GTK	Pelatihan tidak menguasai IT			yang tidak meningkat 2. Harapan adanya pelatihan tidak tercapai secara maksimal	Pendidikan
11	Program Pengelolaan Pendidikan	Terbentuknya Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Pelaksanaan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik tidak dapat terbentuk	ROO.24.01.25.11	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid	1. Tidak adanya fasilitas dari Dinas Pendidikan 2. Kurang adanya Koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Ketua Forum/Komunitas	Internal	C	Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan kurang berkembang	Dinas Pendidikan, satuan pendidikan dan Tenaga pendidik dan kependidikan
12	Program Pengelolaan Pendidikan	Terlaksananya kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pelaksanaan	Masih adanya tindakan perundungan, dan kekerasan/Bullying pada satuan pendidikan	ROO.24.01.25.12	Kepala Dinas pendidikan dan KABID SD,SMP dan PNF	1. Adanya persepsi yang berbeda tentang bullying oleh civitas sekolah 2. Tata Kelola sekolah yang masih perlu perbaikan terutama yang berhubungan dengan tindak perundungan	Internal	C	Terjadinya tindak Perundungan dan kekerasan pada satuan pendidikan	Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan dan Peserta Didik

							dan kekerasan				
13	Program Pengelolaan Pendidikan	Perlengkapan Peserta Didik Tersedia Sesuai dengan Standar	Pendataan	Tidak Tersampainya Informasi ke Satuan Pendidikan untuk pendataan peserta didik yang berhak menerima	ROO.24.01.25.13	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD,SMP PNF	Satuan Pendidik tidak Menrima Surat Undangan Sosialisasi	Internal	C	Adanya peserta didik dari satuan pendidikan yang tidak menerima perlengkapan siswa	Dinas Pendidikan dan peserta Didik yang berhak menerima
14	Program Pengelolaan Pendidikan	Perlengkapan Peserta Didik Tersedia sesuai dengan Standar	Pelaksanaan	Perlengkapan Peserta didik yang diterima tidak sesuai dengan standar yang ditentukan	ROO.24.01.25.14	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD,SMP , PNF	Pengadaan barang tidak dilakukan secara transparan	Internal	C	Kualitas barang yang diterima oleh peserta didik berkualitas rendah	Dinas Pendidikan dan Peserta Didik
15	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan dan Rehabilitasi sarana prasarana dan utilitis sekolah sesuai standar	Pelaksanaan	Penyelesaian Pembangunan melebihi waktu yang ditentukan/tidak sesuai dengan juknis	ROO.24.01.25.15	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD,SMP ,PNF	1. Kendala cuaca yang tidak menentu 2. Pencairan dana yang terlambat	Eksternal	C	Pembangunan tidak selesai tepat waktu	Disdik, Kontraktor dan satuan pendidikan

Formulir Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian 2024

Nama OPD Dinas Pendidikan

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
Risiko Strategis OPD Dinas Pendidikan							
1	Dinas Pendidikan	Masih rendahnya angka partisipasi warga usia 15 tahun keatas yang belum menyelesaikan pendidikan formal untuk mengikuti pendidikan kesetaraan	RSO.24.01.25.01	10	Kepala Dinas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan 2. Banyak yang sudah berkeluarga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya angka rata-rata lama sekolah 2. Berpotensi bertambahnya angka kemiskinan
2	Dinas Pendidikan	Masih adanya angka putus sekolah pada setiap jenjang	RSO.24.01.25.2	9	Kepala Dinas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Pendidikan yang tidak terjangkau oleh keluarga miskin 2. Masih adanya Bullying atau tindak kekerasan di sekolah 3. Kurangnya kesadaran siswa dan orang tua akan pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Harapan Lama Sekolah Menurun sehingga tidak mencapai target yang telah di tetapkan 2. Banyak Pekerja Anak Di bawah umur 3. Berdampak pada naiknya angka kemiskinan
3	Dinas Pendidikan	Masih terdapat guru yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat Pendidik	RSO.24.01.25.3	11	Kepala Dinas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru belum memenuhi kualifikasi S1/D4 linier 2. Belum terdaftar pada Dapodik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesejahteraan guru belum meningkat 2. Kualitas guru masih rendah 3. Kualitas pendidikan tidak merata dan mengalami penurunan
4	Dinas Pendidikan	Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan yang tidak mencapai target	RSO.24.01.25.4	5	Kepala Dinas pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang tidak berkompeten 2. Integritas dan etika yang rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak bisa tercapai peLayanan secara maksimal 2. Akuntabilitas Kinerja tidak bisa tercapai dengan baik

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
Risiko Operasional OPD							
1	Dinas Pendidikan	Adanya keterlambatan pendataan pada satuan pendidikan yang masih akreditasi C dan Satuan Pendidikan yang belum Akreditasi	ROO.24.01.25.1	9	Kepala Dinas, Kabid Bidang dan Satuan Pendidikan	1. Satuan Pendidikan belum mengirimkan data akreditasi 2. Adanya Satuan Pendidikan yang baru berdiri	1. Terlambat dalam Pengumpulan data Sekolah yang belum akreditasi 2. Tidak masuk dalam prioritas penilaian oleh BAN 3. Satuan Pendidikan telat untuk penilaian akreditasi
2	Dinas Pendidikan	Adanya Satuan Pendidikan yang belum memenuhi syarat untuk penilaian akreditasi sekolah	ROO.24.01.25.2	8	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD, SMP dan PNF	1. Sarana dan Prasarana satuan pendidikan yang belum memadai 2. Kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan yang belum standar 3. Pembelajaran yang belum sesuai dengan kurikulum yang berlaku	1. Satuan Pendidikan tidak lolos penilaian akreditasi 2. Nilai Akreditasi yang belum naik minimal B
3	Dinas Pendidikan	Pendataan satuan Pendidikan yang berhak untuk menerima bantuan terlambat diterima	ROO.24.01.25.3	6	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD, SMP dan PNF	Satuan pendidikan belum melakukan pemutakhiran data sarpras di aplikasi DAPODIK	1. Data terlambat diterima oleh Dinas Pendidikan 2. salah sasaran pemberian bantuan
4	Dinas Pendidikan	Masih terdapat Peserta didik dari keluarga miskin yang tidak menerima beasiswa	ROO.24.01.25.4	11	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD, SMP dan PNF	Tidak Terdata dalam pengajuan beasiswa	1. Meningkatnya angka putus sekolah 2. Pengetasan kemiskinan terhambat
5	Dinas Pendidikan	Pengajuan Formasi ASN tidak sesuai dengan Analisis Kebutuhan	ROO.24.01.25.5	9	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid GTK	1. Adanya kesalahan dalam penghitungan analisis kebutuhan 2. Satuan pendidikan terlambat mengirimkan data analisis kebutuhan ke dinas	1. Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan tidak merata 2. adanya Kesenjangan kualitas pendidikan

						pendidikan	
6	Dinas Pendidikan	Masih terdapat guru yang tidak bisa naik pangkat dan jabatan pada periode tersebut	ROO.24.01.25.6	7	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid GTK	Banyak guru yang tidak memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat dan jabatan	Guru tidak bisa naik pangkat dan jabatan pada periode tersebut
7	Dinas Pendidikan	Terdapat satuan Pendidikan yang tidak menerima SK. Penerima BOS/BOP	ROO.24.01.25.7	8	Kepala Dinas pendidikan, Sekretaris Dinas	Satuan Pendidikan tidak melakukan penginputan data sekolah yang benar pada Aplikasi DAPODIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sataun pendidikan tidak menerima dana BOS dan BOP 2. Terhambatnya Proses Pembelajaran karena terbenturnya anggaran
8	Dinas Pendidikan	Adanya satuan pendidikan yang belum memahami JUKNIS BOS/BOP secara benar	ROO.24.01.25.8	9	Kepala Dinas pendidikan dan Sekretaris Dinas	Keterbatasan tenaga SDM Bendahara terutama untuk PAUD dan SD	Banyak Laoran Yang tidak sesuai dengan JUKNIS
9	Dinas Pendidikan	Satuan Pendidikan terlambat dalam penyampaian laporan BOS/BOP sesuai waktu yang sudah di tetapkan	ROO.24.01.25.9	12	Kepala Dinas pendidikan dan Sekretaris Dinas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak Bendahara BOS/BOP yang belum mengerti aplikasi ARKAS 2. Sering Bergantinya dan Update Aplikasi ARKAS sehingga menyulitkan bendahara untuk memahaminya 	Terlambat dalam menyampaikan laporan akan berdampak pada pemotongan dana BOS/BOP
10	Dinas Pendidikan	Banyak Peserta Pelatihan Aplikasi yang kurang memahami apa yang disampaikan oleh narasumber	ROO.24.01.25.10	8	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid GTK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur yang kurang kompeten 2. Peserta Pelatihan tidak menguasai IT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Peserta pelatihan yang tidak meningkat 2. Harapan adanya pelatihan tidak tercapai secara maksimal
11	Dinas Pendidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik tidak dapat terbentuk	ROO.24.01.25.11	6	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya fasilitas dari Dinas Pendidikan 2. Kurang adanya Koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan Ketua 	Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan kurang berkembang

						Forum/Komunitas	
12	Dinas Pendidikan	Masih adanya tindakan perundungan, dan kekerasan/Bullying pada satuan pendidikan	ROO.24.01.25.12	10	Kepala Dinas pendidikan dan KABID SD,SMP dan PNF	3. Adanya persepsi yang berbeda tentang bullying oleh civitas sekolah 4. Tata Kelolah sekolah yang masih perlu perbaikan terutama yang berhubungan dengan tindak perundungan dan kekerasan	Terjadinya tindak Perundungan dan kekerasan pada satuan pendidikan
13	Dinas Pendidikan	Tidak Tersampainya Informasi ke Satuan Pendidikan untuk pendataan peserta didik yang berhak menerima	ROO.24.01.25.13	9	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD,SMP PNF	Satuan Pendidik tidak Menrima Suarat Undangan Sosialisasi	Adanya peserta didik dari satuan pendidikan yang tidak menerima perlengkapan siswa
14	Dinas Pendidikan	Perlengkapan Peserta didik yang diterima tidak sesuai dengan standar yang ditentukan	ROO.24.01.25.14	6	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD,SMP, PNF	Pengadaan barang tidak dilakukan secara transparan	Kualitas barang yang diterima oleh peserta didik berkualitas rendah
15	Dinas Pendidikan	Penyelesaian Pembangunan melebihi waktu yang ditentukan/tidak sesuai dengan juknis	ROO.24.01.25.15	9	Kepala Dinas pendidikan dan Kabid SD,SMP,PNF	1. Kendala cuaca yang tidak menentu 2. Pencairan dana yang terlambat	Pembangunan tidak selesai tepat waktu

**Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan
Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan**

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Pnyelelesaian
1	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik ditindaklanjuti masih belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku	Pimpinan melakukan tindak lanjut atas pelanggaran perilaku/kode etik dengan sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku secara adil tidak ada pengecualian	Kepala Dinas Pendidikan/Sekretaris	2024
2	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi tetapi belum dilakukan secara berkala.	-Mengadakan Bimtek/pelatihan pengelolaan resiko pada pegawai dilkakukan secara berkala dan tepat sasaran	Kepala Dinas Pendidikan/Sekretaris	2024
3	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan tapi belum terlaksana secara konsisten	Pimpinan secara konsisten menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	Kepala Dinas Pendidikan/Sekretaris	2024
4	Tidak Semua pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap tetapi masih ada pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	Pengajuan Formasi ASN Sesuai kebutuhan di utamakan pegawai PTT Dinas pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan/Sekretaris	2024
5	Maih ada kriteria pendelegasian wewenang ditentukan belum secara tepat	Pimpinan mengkomunikasikan wewenang dan tanggung jawab dengan jelas dan dipahami oleh pegawai,kemudian direviu dan dimutakhirkan secara berkala	Kepala Dinas Pendidikan/Sekretaris	2024
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, tetapi belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	Pimpinan membuat analisis dan evaluasi kinerja pegaeai untuk di usulkan ke BKPSDM sebagai bahan pertimbangan untuk perhitungan penghasilan	Kepala Dinas Pendidikan/Sekretaris	2024
7	APIP belum memahami sepenuhnya bagaimana dalam melaksanakan pengawasan berbasis risiko	APIP setiap melaksnakan pengawasan dilakukan dengan berbasis resiko yang harus dipahami oleh setiap petugas	Kepala Dinas Pendidikan/Sekretaris	2024
8	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun hanya saja perlu adanya mekanisme tindak lanjut temuan	Setiap temuan yang ada dilakuakn tindak lanjut sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku	Kepala Dinas Pendidikan/Sekretaris	2024

Formulir Kertas Kerja
 Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2024
Tujuan Strategis Pemda	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing
Urusan Pemerintahan	Pendidikan
Dinas Terkait	Dinas Pendidikan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Strategis OPD Dinas Pendidikan:							
1	Masih rendahnya angka partisipasi warga usia 15 tahun keatas yang belum menyelesaikan pendidikan formal untuk mengikuti pendidikan kesetaraan	RSO.24.01.25.01	Pendataan masyarakat yang putus sekolah atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan formal	Banyaknya penduduk Lamongan yang bekerja di luar kabupaten Lamongan	Melakukan Kerjasama dengan Instansi terkait terutama pemerintahan desa setempat dalam melaksanakan pendataan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid PNF	Semester 1 (Jan s/d Juni 2024)
2	Masih adanya angka putus sekolah pada setiap jenjang	RSO.24.01.25.2	3. MemberPemberian Beasiswa PERINTIS Untuk peserta didik dari keluarga Miskin dari jenjang SD sampai Perguruan Tinggiikan program beasiswa bagi guru yang belaum berkualifikasi S1/D4 4. Melakukan sosialisasi pada Guru akan pentingnya sertifikat pendidik	Keterbatasan Anggaran sehingga masih ada peserta didik yang memenuhi syarat tapi belum mendapatkan beasiswa	1. Memprioritaskan dari keluarga miskin yang belum mendapat bantuan dari program lain 2. Pengajuan Penambahan Anggaran untuk beasiswa	Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas Pendidikan	Tribulan 4 (Okt sd Des 2024)
3	Masih terdapat guru yang	RSO.24.01.25.3	3. Memberikan	3. kurang	1. Memberi	Kepala Dinas	Jan sd Des

	belum memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat Pendidik		<p>program beasiswa bagi guru yang belum berkualifikasi S1/D4</p> <p>4. Melakukan sosialisasi pada Guru akan pentingnya sertifikat pendidik</p>	<p>minatnya guru untuk melanjutkan pendidikan ke S1/D4</p> <p>4. Masih banyak guru yang belum masuk di aplikasi Dapodik</p>	<p>pendampingan dan sosialisasi pada guru yang belum bersertifikat pendidik</p> <p>2. Melakukan input data guru pada aplikasi Dapodi</p>	Pendidikan dan Kabid GTK	2024
4	Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan yang tidak mencapai target	RSO.24.01.25.4	<p>3. Perbup No. 29 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan</p> <p>4. Program Pelatihan dan BIMTEK SAKIP</p>	masih terdapat Kualitas SDM yang belum memenuhi standar	<p>1. Melaksanakan sosialisasi tentang SAKIP</p> <p>2. Melaksanakan Pelatihan dan BIMTEK SAKIP kepada Semua Pegawai</p>	Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas	Tribulan II (April sd Jun 2024)

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Operasional OPD Dinas Pendidikan:							
1	Adanya keterlambatan pendataan pada satuan pendidikan yang masih akreditasi C dan Satuan Pendidikan yang belum Akreditasi	ROO.24.01.25.1	3. Input dan Sinkronisasi Data secara berkala pada Aplikasi Dapodik oleh satuan pendidikan 4. Membuat Jadwal jadwal satuan pendidikan yang memenuhi syarat untuk di ajukan penilaian akreditasi.	Satuan pendidikan tidak melakukan updating data pada aplikasi dapodik	Dinas pendidikan melakukan sosialisasi ke satuan pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan dan Bidang SD, SMP dan PNF	Tribulan 1 (Jan sd Mart 2024)
2	Adanya Satuan Pendidikan yang belum memenuhi syarat untuk penilaian akreditasi sekolah	ROO.24.01.25.2	Satuan Pendidikan melakukan persiapan semua dokumen sesuai dengan instrumen akreditasi	Banyak dokumen yang di minta pada instrumen akreditasi di mengerti oleh satuan pendidikan	Sosialisasi dan pendampingan terhadap sataun pendidikan yang akan dinilai oleh BAN -SM	Kepala Dinas Pendidikan dan Bidang SD, SMP dan PNF	Tribulan 3 (Juli sd Sep 2024)
3	Pendataan satuan Pendidikan yang berhak untuk menerima bantuan terlambat diterima	ROO.24.01.25.3	Input data dan sinkronisasi pada aplikasi dapodik secara berkala	Data sarpras pada dapodik banayk yang tidak diupdate sesuai kondisi	Tim Sarpras Dinas Pendidikan melakukan CEK kondisi sarpras langsung ke lokasi	Kepala Dinas Pendidikan dan Bidang SD, SMP dan PNF	Tribulan 1 (Jan sd Maret 2024)
4	Masih terdapat Peserta didik dari keluarga miskin yang tidak menerima beasiswa	ROO.24.01.25.4	Melakukan prioritas pada Peserta didik yang belum mendapat bantuan dari yang lainnya	Data diterima sudah melebihi batas waktu yang ditetapkan	1. Melakukan Sosialisasi 2. Pengajuan penmabhan Anggaran Beasiswa	Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Dinas	Tribulan 2 (April sd Jun 2024)
5	Pengajuan Formasi ASN tidak sesuai dengan Analisis Kebutuhan	ROO.24.01.25.5	1. ANJAB Dinas Pendidikan 2. Data Analisis	Adanya perbedaan data Dapodik dengan	Melakukan perbaik data pada Dapodik dan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid GTK	Tribulan I (Jan sd Maret 2024)

			Kebutuhan oleh satuan pendidikan	Data Analisis Kebutuhan	data analisis kebutuhan oleh satuan pendidikan		
6	Masih terdapat guru yang tidak bisa naik pangkat dan jabatan pada periode tersebut	ROO.24.01.25.6	3. Sosialisasi Tentang PAK 4. Input data di Aplikasi PMM	adanya sebagian guru yang belum memanfaatkan Aplikasi PMM	Dinas Pendidikan Melakukan Sosialisasi dan BIMTEK cara pengerjaan Ekinerja di PMM	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid GTK	Tribulan I (Jan sd Maret 2024)
7	Terdapat satuan Pendidikan yang tidak menerima SK. Penerima BOS/BOP	ROO.24.01.25.7	1. Semua Satuan Pendidikan Sudah Terupdate di DAPODIK 2. Semua data di DAPODIK Valid	Masih ada satuan pendidikan yang terlambat sinkronisasi data melebihi Cut Off	Melakukan Sosialisasi dan Pendampingan pada satuan pendidikan untuk Pengerjaan Dapodik	Kepala Dinas Pendidikan dan Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Januari dan Juli 2024
8	Adanya satuan pendidikan yang belum memahami JUKNIS BOS/BOP secara benar	ROO.24.01.25.8	1. Semua Satuan Pendidikan Memiliki Juknis BOS/BOP 2. Di berikan layanan BOS/BOP secara daring dan luring	Adanya persepsi yang berbeda-beda oleh satuan pendidikan mengenai apa yang ada pada Juknis BOS/BOP	Melakukan BIMTEK dan Sosialisasi ke satuan Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris	April - Mei 2024
9	Satuan Pendidikan terlambat dalam penyampaian laporan BOS/BOP sesuai waktu yang sudah di tetapkan	ROO.24.01.25.9	Selalu Mengingatn kepada Satuan Pendidikan	Adanya satuan pendidikan yang aplikasi ARKASnya mengalami kendala	1. Melakukan BIMTEK ARKAS 2. Layanan ARKAS secara daring/Luring	Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris	Jan - Des 2024
10	Banyak Peserta Pelatihan Aplikasi yang kurang memahami apa yang disampaikan oleh narasumber	ROO.24.01.25.10	1. Pemberian waktu untuk tanya jawab 2. Narasumber yang menguasai materi	Nasih ada peserta pelatihan yang tidak menguasai teknologi informasi	Melalui pelatihan dan BIMTEK semua guru menguasai IT	Kepala Bidang GTK	Juli - Agt 2024
11	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik tidak	ROO.24.01.25.11	Adanya Forum pendidik dan Tenaga	Belum adanya Koordinasi	Dinas Pendidikan Melakukan	Kepala Dinas Pendidikan dan	Juli 2024

	dapat terbentuk		kependidikan secara mandiri	antara Dinas Pendidikan dengan Koordinator komunitas	koordinasi dan memfasilitasi pembentukan komunitas belajar	Kabid	
1 2	Masih adanya tindakan perundungan, dan kekerasan/Bullying pada satuan pendidikan	ROO.24.01.25.1 2	1. Membuat Inovasi BU EWIS 2. Membentuk TPPK	Adanya perbedaan persepsi tentang Bullying/tindak kekerasan pada satuan pendidikan	melakukan Sosialisasi dan pendampingan kepada satuan pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan dan Kabid	Jan - Des 2024
1 3	Tidak Tersampainya Informasi ke Satuan Pendidikan untuk pendataan peserta didik yang berhak menerima	ROO.24.01.25.1 3	Surat Undangan Sosialisasi ke satuan pendidikan	Adanya Satuan pendidikan yang terlambat menerima informasi	Menyampaikan informasi lewat surat, Website dan Medsos	Kepala Dinas dan Kabid	Mei - Juli 2024
1 4	Perlengkapan Peserta didik yang diterima tidak sesuai dengan standar yang ditentukan	ROO.24.01.25.1 4	Pengadaan barang sesuai dengan juknis yang berlaku	masih adanya barang yang tidak sesuai dengan standar	Melakukan pengadaan barang secara terbuka	Kepala Dinas dan Kabid	Juli - Agts 2024
1 5	Penyelesaian Pembangunan melebihi waktu yang ditentukan/tidak sesuai dengan juknis	ROO.24.01.25.1 5	Melaksanakan pekerjaan lebih awal ketika sudah keluar surat perintah untuk mengerjakan	Tidak segera melaksanakan pekerjaan meskipun sudah ada surat perintah melaksanakan pekerjaan	Melaksanakan Pekerjaan Sesuai dengan Juknis yang berlaku	Kepala Dinas dan Kabid	Jun - Des 2024

Formulir Kertas Kerja
Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2024
Tujuan Strategis Pemda	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing
Urusan Pemerintahan	Pendidikan
Dinas Terkait	Dinas Pendidikan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Pendidikan:						
1	Melakukan Kerjasama dengan Instansi terkait terutama pemerintaan dese setempat dalam melaksanakan pendataan	Surat Undangan Nota Dinas Rapat Koordinasi	Dinas Pendidikan	Instansi dan Pemerintahan Desa Terkait	Jan s/d Juni 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu
2	1. Memprioritaskan dari keluarga miskin yang belum mendapat bantuan dari program lain 2. Pengajuan Penambahan Anggaran untuk beasiswa	Surat Undangan Sosial Media Surat Pengajuan Penambahan Anggaran	Dinas Pendidikan(Sekretariat Disdik)	Instansi Terkait, Satuan Pendidikan, Peserta didik dan Mahasiswa	Juli sd Sep 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu
3	1. Memberi pendampingan dan sosialisasi pada guru yang belum bersertifikat pendidik 2. Melakukan input data guru pada aplikasi Dapodik	Surat Undangan Rapat Sosialisasi Lurung/Daring	Dinas Pendidikan (Bidang GTK) dan Satuan Pendidikan	Satuan Pendidikan dan Guru	Jan - Maret 2024	dilaksanakan secara berkala
4	1. Melaksanakan	Surat Undangan	Dinas Pendidikan/Sekretriati	Pegawai Dinas	Juli - Sep	dilaksanakan

	sosialisasi tentang SAKIP 2. Melaksanakan Pelatihan dan BIMTEK SAKIP kepada Semua Pegawai	Rapat Koordinasi Luring/Daring		Pendidikan	2024	pada waktu tertentu
Risiko Operasional OPD Dinas Pendidikan:						
1	Dinas pendidikan melakukan sosialisasi ke satuan pendidikan	Surat Undangan Nota Dinas Luring/daring Sosial Media	Dinas Pendidikan/Kabid SD, SMP dan PNF	satuan Pendidikan	Tribulan II (April sd Juni)	dilaksanakan pada waktu tertentu
2	Sosialisasi dan pendampingan terhadap sataun pendidikan yang akan dinilai oleh BAN -SM	Surat Undangan Nota Dinas Luring/daring Sosial Media	Dinas Pendidikan/Kabid SD, SMP dan PNF	satuan Pendidikan	Tribulan III (Juli sd Sep 2024)	dilaksanakan pada waktu tertentu
3	Tim Sarpras Dinas Pendidikan melakukan CEK kondisi sarpras langsung ke lokasi	Surat Pemberitahuan Sosial Media	Dinas Pendidikan/Kabid SD, SMP dan PN	satuan Pendidikan	Tribulan I (Jan sd Maret 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu
4	1. Melakukan Sosialisasi 2. Pengajuan penmabhan Anggaran Beasiswa	Surat Undangan Sosial Media	Dinas Pendidikan/Sekretariat	Peserta didik/mahasiswa/masy arakat	Tribulan III (Juli sd Sep 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu
5	Melakukan perbaikiak data pada Dapodik dan data analisi kebutuhan oleh satuan pendidikan	Surat Pemberitahuan Sosial Media Luring/daring	Dinas Pendidikan/Bidang GTK	Guru dan Operator Dapodik	Tribulan I (Jan sd Maret 2024)	dilaksanakan secara berkala
6	Dinas Pendidikan Melakukan Sosialisasi dan BIMTEK cara pengerjaan Ekinerja di PMM	Surat Undangan Sosialisasi dan BIMTEK Sosial Media	Dinas Pendidikan/Bidang GTK	Satuan Pendidikan, Pendidik dan tenaga kependidikan	Tribulan I (Jan sd Maret 2024)	dilaksanakan pada waktu tertentu
7	Melakukan Sosialisasi dan Pendampingan pada satuan	Surat Undangan Sosialisasi dan BIMTEK	Dinas Pendidikan/Sub bag Perencanaan	Satuan Pendidikan/OPS	Januari - Agustus 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu

	pendidikan untuk Pengerjaan Dapodik	Sosial Media				
8	Melakukan BIMTEK dan Sosialisasi ke satuan Pendidikan	Surat Undangan Sosialisasi dan BIMTEK Sosial Media	Dinas Pendidikan/Sub bag Perencanaan	Satuan Pendidikan/Bendahara BOS/BOP	Januari - Agustus 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu
9	1. Melakukan BIMTEK ARKAS 2. Layanan ARKAS secara daring/Luring	Surat Undangan Sosialisasi dan BIMTEK Sosial Media	Dinas Pendidikan/Sekretaris Dinas	Satuan Pendidikan/Bendahara BOS/BOP	April - Mei 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu
10	Melalui peltihan dan BIMTEK semua guru menguasai IT	Surat Undangan Sosialisasi dan BIMTEK Sosial Media	Dinas Pendidikan/Bidang GTK	Satuan Pendidikan dan tenaga Pendidik	Juli - Agt 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu
11	Dinas Pendidikan Melakukan koordinasi dan memfasilitasi pembentukan komunitas belajar	Surat Undangan Rapat Koordinasi Sosial Media	Dinas Pendidikan/Bidang GTK	Dinas Pendidikan/Bidang GTK	Agustus - Okt 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu
12	melakukan Sosialisasi dan pendampingan kepada satuan pendidikan	Surat Undangan Sosialisasi dan Sosial Media	Dinas Pendidikan/Kepala Bidang	Satuan Pendidikan dan Peserta didik	Mei - Juli 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu
13	Menyampaikan informasi lewat surat, Website dan Medsos	Surat Undangan Sosial Media	Dinas Pendidikan/Kepala Bidang	Satuan Pendidikan dan Peserta didik	April - Juni 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu
14	Melakukan pengadaan barang secara terbuka	Surat Undangan Website Media Sosial	Dinas Pendidikan/Kepala Bidang	Masyarakat/Publik	April - Agustus 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu
15	Melaksanakan Pekerjaan Susuai dengan Juknis yang berlaku	Juknis Surat Media Sosial	Dinas Pendidikan/Kepala Bidang	Satuan Pendidikan dan kontraktor	Mei - Des 2024	dilaksanakan pada waktu tertentu

Formulir Kertas Kerja
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Penilaian	2024
Tujuan Strategis Pemda	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing
Urusan Pemerintahan	Pendidikan
Dinas Terkait	Dinas Pendidikan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Pendidikan:						
1	Melakukan Kerjasama dengan Instansi terkait terutama pemerintaan dese setempat dalam melaksanakan pendataan	1. Nota Dinas 2. Mou Kesepakatan kerjasama dengan instansi lain 3. Monitoring Kegiatan	Kabid PNF	Tribulan 1 (Jan – Mar) tahun 2024	Feb 2024	Dilakukan secara berkala
2	1. Memprioritaskan dari keluarga miskin yang belum mendapat bantuan dari program lain 2. Pengajuan Penambahan Anggaran untuk beasiswa	1. MONEV 2. Supervisi	Sekretaria Dinas Pendidikan	Juli - Des 2024	Des 2024	Dilakukan secara berkala
3	1. Memberi pendampingan dan sosialisasi pada guru yang belum bersertifikat pendidik 2. Melakukan input data guru pada aplikasi Dapodik	1. Undangan Sosialisasi dan pendampingan 2. Monitoring Aplikasi Dapodik	Bidang GTK	Jan - Juni 2024	Juni 2024	Dilakukan secara berkala
4	1. Melaksanakan sosialisasi tentang SAKIP 2. Melaksnakan Pelatihan dan BIMTEK SAKIP kepada Semua Pegawai	1. Surat Undangan 2. Nota Dinas 3. Kehadiran 4. Monev Kegiatan	Sekretaris Dinas Pendidikan	Juli - Sep 2024	Sep. 2024	Dilakukan secara berkala
Risiko Operasional OPD Dinas Pendidikan:						
1	Dinas pendidikan melakukan sosialisasi ke satuan pendidikan	1. Monev 2. Supervisi	Kabid SD,SMP dan PNF	Juli - Sep 2024	Juli 2024	Dilakukan secara

		3. Surat Undangan 4. Kehadiran				berkala
2	Sosialisasi dan pendampingan terhadap satuan pendidikan yang akan dinilai oleh BAN -SM	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat Undangan 4. Kehadiran	Kabid SD,SMP dan PNF	Juni - Agst 2024	Juni 2024	Dilakukan secara berkala
3	Tim Sarpras Dinas Pendidikan melakukan CEK kondisi sarpras langsung ke lokasi	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat Undangan 4. Kehadiran	Kabid SD,SMP dan PNF	Jan - Mar 2024	Feb 2024	Dilakukan secara berkala
4	1. Melakukan Sosialisasi 2. Pengajuan penambahan Anggaran Beasiswa	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat Undangan 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kabid SD,SMP dan PNF	Agus - Okt 2024	Agust 2024	Dilakukan secara berkala
5	Melakukan perbaikan data pada Dapodik dan data analisis kebutuhan oleh satuan pendidikan	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat Undangan 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kabid GTK	Jan - Mar 2024	Jan dan Juli 2024	Dilakukan secara berkala
6	Dinas Pendidikan Melakukan Sosialisasi dan BIMTEK cara pengerjaan Ekinerja di PMM	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kabid GTK	Jan- Feb 2024	Jan 2024	Dilakukan secara berkala
7	Melakukan Sosialisasi dan Pendampingan pada satuan pendidikan untuk Pengerjaan Dapodik	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kasubag Perencanaan	Jan dan Juli 2024	Jan dan Juli 2024	Dilakukan secara berkala
8	Melakukan BIMTEK dan Sosialisasi ke satuan Pendidikan	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kasubag Perencanaan	Jan dan Juli 2024	Jan dan Juli 2024	Dilakukan secara berkala
9	1. Melakukan BIMTEK ARKAS 2. Layanan ARKAS secara daring/Luring	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Sekrtaris Dinas Pendidikan	Jan dan Juli 2024	Jan dan Juli 2024	Dilakukan secara berkala

10	Melalui pelatihan dan BIMTEK semua guru menguasai IT	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kabid GTK	Mei - Nov 2024	Mei - Nov 2024	Dilakukan secara berkala
11	Dinas Pendidikan Melakukan koordinasi dan memfasilitasi pembentukan komunitas belajar	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kabid GTK	Juli - Des 2024	Juli - Des 2024	Dilakukan secara berkala
12	melakukan Sosialisasi dan pendampingan kepada satuan pendidikan	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kabid SD, SMP, PNF dan GTK	Jan - Des 2024	Jan - Des 2024	Dilakukan secara berkala
13	Menyampaikan informasi lewat surat, Website dan Medsos	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Kehadiran 5. daring/luring	Kabid SD, SMP, PNF dan GTK	April - Juli 2024	April - Juli 2024	Dilakukan secara berkala
14	Melakukan pengadaan barang secara terbuka	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Juknis 5. daring/luring	Kabid SD, SMP, PNF dan GTK	Mei - Juli 2024	Mei - Juli 2024	Dilakukan secara berkala
15	Melaksanakan Pekerjaan Susuai dengan Juknis yang berlaku	1. Monev 2. Supervisi 3. Surat 4. Juknis	Kabid SD, SMP, PNF dan GTK	Mei - Des 2024	Mei 2024	Dilakukan secara berkala